

SIREKAP, Pemilu 2024: Melihat dari Sisi Hukum dan Etika

SIREKAP merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, khususnya Pemilu 2024 yang belum lama ini telah usai. Meskipun dikembangkan untuk kepentingan negara, tetapi ada banyak sekali pro dan kontra dari penggunaan aplikasi ini. Mulai dari kurangnya pengetahuan pengguna terhadap aplikasi, terjadinya kesalahan-kesalahan minor pada sistem, hingga pertimbangan kredibilitas aplikasi ini di mata publik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia saat ini memang sedang berada di masa transisi menuju perubahan ke dunia yang lebih modern. Pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini berusaha dialihkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan SIREKAP, kini penyelenggara (KPU) bisa lebih mudah melakukan integrasi data-data hasil perolehan suara pemilu dari seluruh daerah. Surat suara yang telah dikumpulkan di suatu TPS bisa langsung diinput ke dalam sistem untuk diverifikasi hingga pada akhirnya direkapitulasi dan dipublikasikan. Keberadaan SIREKAP ini menjadi komitmen bagi pemerintah, menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah memang ingin melaksanakan pemilu secara transparan.

Meskipun demikian, sebenarnya penggunaan SIREKAP ini memiliki risiko yang sangat besar, apalagi dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sangat rendah bisa semakin menjadi-jadi. Sebagian dari masyarakat mungkin merasa bahwa kehadiran teknologi ini sangat membantu, tetapi sebagian lainnya merasa resah karena keberadaannya. Kekhawatiran dari publik ini tentu bukanlah menjadi suatu hal yang mengejutkan atau penilaian tanpa alasan. Bagi seseorang yang sudah terjun di dunia IT atau Informatika, kita tahu betul apa-apa saja yang bisa terjadi di dalam sistem seperti ini. Tak hanya pemerintah saja, kejujuran dari pengembang aplikasi sebenarnya juga menjadi hal yang sangat penting untuk diutamakan dalam perancangannya. Inilah yang menjadi alasan kuat, mengapa seorang pengembang aplikasi harus memiliki kesadaran terhadap Hukum dan Etika yang berlaku. Apalagi untuk kepentingan seperti ini, keteguhan hati seorang pengembang benar-benar diperlukan.

Untuk melakukan sebuah kecurangan Pemilu, sebenarnya pihak-pihak tertentu bisa saja melakukannya dengan mudah. Mereka hanya perlu menyuap developer atau pengembang aplikasi, untuk membuat kode program untuk memenangkan pasangan tertentu. Sebagai orang awam, hal-hal seperti ini pastinya berada di luar pengetahuan sebagian besar orang. Orang-orang mungkin hanya akan berpikir, bahwa kecurangan akan terjadi pada saat input atau perhitungan suara di TPS dan hal-hal seperti itu. Padahal, akar masalah sebenarnya bukanlah di situ, peluang terbesar untuk melakukan kecurangan secara masif dan mudah ada pada akhirnya, pada saat pengembangan aplikasinya. Oleh karena itu, maka diperlukan regulasi yang ketat pada pengembangan aplikasi perangkat lunak di Indonesia. Khususnya untuk pengembangan aplikasi seperti SIREKAP ini, diperlukan adanya pengawasan, pengecekan setiap baris kode, lalu pemahaman yang kuat antara pengawas dari sisi teknologi dan juga dari pihak yang menjadi pemilik sistem pada akhirnya. Hal ini tentu tidak akan menjadi sebuah solusi yang efektif, apabila setiap pihak yang terlibat tidak memiliki kejujuran dan juga pemahaman tinggi terhadap penerapan hukum dan etika, termasuk di bidang Informatika.